



Keterlambatan Penyerahan Dokumen Anggaran

Proyek Pembangunan DKI Terancam Mangkrak

Kepala dinas dan unit kerja diingatkan agar tak mengulur waktu.

Juli Hantoro

juli@tempo.co.id

JAKARTA — Pelaksanaan proyek pembangunan di DKI Jakarta terancam terhambat. Sebab, satuan dan unit kerja perangkat daerah yang menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran kurang dari 30 persen. Padahal tenggat penyerahannya adalah hari ini. "Jika dihitung kembali, yang benar-benar lengkap tak lebih dari 20 persen," kata Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI, Asiansyah, di kantornya kemarin.

Jumlah tersebut menurun ketimbang pada Kamis pekan lalu. Saat itu, tercatat 30 persen dari total 748 perangkat kerja daerah DKI Jakarta telah menyetorkan dokumen pelaksanaan anggaran. Asiansyah menjelaskan, dari unit-unit yang telah mengumpulkan dokumen itu, ternyata ada yang nomornya kurang lengkap sehingga akhirnya dikembalikan lagi.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengancam akan menindak jika ada satuan dan unit kerja yang sengaja mengulur waktu penyerahan dokumen itu. "Kami tak segan menurunkan kepala dinas menjadi staf atau unit-unit di bawahnya," kata dia.

Dokumen pelaksanaan

anggaran merupakan salah satu syarat agar anggaran cair. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015, batas akhir penyerahan dokumen tersebut adalah hari ini.

Konsekuensi keterlambatan penyerahan dokumen adalah proyek-proyek pembangunan DKI Jakarta akan mangkrak. Kepala unit atau kepala dinas akan terlambat mengajukan program dan jadwal persiapan lelang mundur.

Heru berdalih telah rajin mengirim pesan pendek kepada para pejabat dari tingkat kelurahan hingga suku dinas agar segera menyerahkan dokumen anggaran yang diperlukan. Namun, kata dia, beberapa pejabat sengaja mengulur waktu penyerahan dokumen. Tindakan itu merupakan tanda-tanda penyelewengan anggaran pengadaan program kerja. "Jika oknumnya ketahuan, Pak Ahok akan langsung panggil dan pecat," ujar dia.

Menurut Heru, pencairan anggaran akan dilakukan lebih dulu bagi perangkat kerja yang masuk prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan, kebersihan, dan pekerjaan umum. "Makanya harus cepat agar tak keduluan program prioritas pemerintah provinsi," kata dia.

Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Prabowo

Soenirman, memperkirakan dana pembangunan akan cair sekitar akhir Juni mendatang. Sebab, masalah pencairan anggaran tidak hanya selesai dengan menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran. "Ada tahapan selanjutnya," ujar Prabowo. Setelah menyerahkan dokumen, terbitlah surat penyediaan dana. Jika surat tersebut sudah terbit, anggaran akan cair. Tahapan tersebut, kata dia, memakan waktu sekitar sebulan lebih.

Direktur Center for Budget Analysis, Uchok Sky Kadafi, mengatakan dokumen pelaksanaan anggaran merupakan rincian anggaran paling jelas. Dalam dokumen tersebut, terdapat harga satuan, volume, dan jumlah barang yang harus dibelanjakan.

Jika dokumen itu tidak ada, ujar Uchok, tidak akan ada petunjuk kegiatan penggunaan anggaran. Selain itu, potensi korupsi dinilai bakal besar jika tidak ada dokumen. "Beli barang bisa digelembungkan," ucapnya.

● YOLANDA RYAN ARMINDYAJ ERWAN HERMAWAN